



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Simboro, Mamuju,  
Sulawesi Barat WA Live Chat. 0823-9888-8900  
website <https://sulbar.bpk.go.id>,  
Sosial Media X, Instagram, Youtube, TikTok: @bpkrisulbar

## **SIARAN PERS**

### **PENYERAHAN LHP ATAS LKPD KABUPATEN MAMASA TA 2023**

#### ***Mamuju – Humas dan TU Perwakilan***

**Senin (12/06)** – sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran (TA) 2023 yang ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPD Kabupaten Mamasa.

Atas pemeriksaan tersebut, Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat **Rizki Satriyo Nugroho**, didampingi Plh. Kepala Perwakilan, **Muhammad Ali Porseni Baso**, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Mamasa TA 2023 kepada Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, **Orsan Soleman** dan Pj. Bupati Mamasa, **Muhammad Zain**.

Dalam sambutannya, Rizki menyampaikan bahwa Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Mamasa TA 2023 dilaksanakan dengan memperhatikan empat kriteria yaitu (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (2) Kecukupan pengungkapan; (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan dengan memperhatikan Standar Pemeriksaan dan Tingkat Materialitas atas penyajian LKPD Kabupaten Mamasa TA 2023, BPK RI memberikan Opini “**Wajar Dengan Pengecualian**” (WDP) dengan ditemukannya beberapa permasalahan yang berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPD Kabupaten Mamasa TA 2023 yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mamasa untuk segera diperbaiki dan ditindaklanjuti antara lain (1) Penganggaran dan pelaksanaan Pendapatan, Belanja, Defisit, dan Pembiayaan Pinjaman tidak sesuai ketentuan serta pengelolaan kas belum memadai; (2) Belanja Modal Jalan pada Dinas PUPR dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan (3) Pengelolaan Belanja Tak Terduga dilaksanakan tidak sesuai ketentuan; dan (4) Pengelolaan Aset Tetap Tanah, Gedung, dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya belum tertib.

Lebih lanjut, Rizki berharap agar dengan capaian opini WDP tersebut dapat menjadi pendorong serta pemacu bagi Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam melaksanakan perbaikan pengelolaan keuangan daerah di tahun berikutnya dan berharap agar DPRD dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaan ini, terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, serta mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Mamasa untuk menindaklanjuti Rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.